

# **Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Periode Tahun 2014 – 2018)**

Oleh

**M. Yoga Susilo Widyanto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[myogasusilo20@gmail.com](mailto:myogasusilo20@gmail.com)

Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan Rasio Keuangan, Data yang digunakan adalah APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 – 2018. Metode Penelitian ini dengan menggunakan 5 aspek Rasio Keuangan Daerah yaitu: 1) Rasio Efektifitas PAD, 2) Rasio Efisiensi, 3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 4) Rasio Pertumbuhan, 5) Rasio Keserasian. Data yang digunakan adalah data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang datanya di ambil di laman DJPK Kementerian Keuangan. Hasil analisa data menyebutkan bahwa didapatkan rata – rata setiap rasio keuangan daerah beserta kriteria yang diperoleh, Rasio Efektifitas PAD rata – rata sebesar sebesar 118,75%, kemudian Rasio Efisiensi rata – rata sebesar 102,15%, kemudian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah rata – rata sebesar 59,67%, kemudian Rasio Pertumbuhan ada 4 penilaian yaitu: 1) PAD rata – rata pertumbuhan sebesar 7,20%, 2) Pendapatan rata – rata pertumbuhan sebesar 7,87%, 3) Belanja Operasional rata – rata pertumbuhan sebesar -8,21%, 4) Belanja Modal rata – rata pertumbuhan sebesar 26,67%, Rasio Keserasian ada 2 poin yaitu Belanja Modal dan Belanja Operasional, Belanja Modal rata – rata 44,27% sementara Belanja Operasional sebesar 55,73%. Dan kesimpulan yang diambil bahwa untuk Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo dilihat dari aspek 5 Rasio perhitungan, dari Rasio Efektifitas PAD yang dikatakan Efektif, kemudian Rasio Efisiensi yang dikatakan tahun 2014 – 2015 tidak efisien dan 2016 – 2018 efisien, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dikatakan kategori Partisipatif, Rasio Pertumbuhan yang mencatatkan nilai plus hanya untuk Belanja Operasional yang minus, dan Rasio Keserasian yang hampir dikatakan serasi.

**Kata Kunci:** Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efisiensi

## **PENDAHULUAN**

Terbentuknya otonomi daerah dimulai semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri dari mulai menggerakkan roda Pemerintahan Daerah Sendiri dan mengelola kekayaan daerah, dan juga mengelola mengenai keuangan daerah secara mandiri. Keberhasilan otonomi daerah juga tidak terlepas dari proses pengelolaan keuangan daerah yang baik juga serta pengalokasian dana guna menjalankan roda pemerintahan dan juga pembangunan daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang baik bisa dapat dikategorikan Pemerintah daerah tersebut telah berhasil membangun dan mengelola daerah tersebut, dalam penelitian ini tujuannya untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam periode tahun anggaran 2014 – 2018, dari mulai perhitungan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, serta Belanja Daerah dari mulai Belanja Operasional dan Belanja Modal serta menganalisa kenaikan maupun penurunan pendapatan daerah.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berikut ini rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?

4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari Rasio Keserasian?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995). Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu

sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (Darise, 2009). Menurut pasal 1 UU no.32 tahun 2004, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah, didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Adapun beberapa bagian dari APBD yaitu:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah uang yang masuk kedalam kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun tersebut. Dalam standar akuntansi pemerintah (Mahmudi, 2016). Jadi pendapatan adalah seluruh penerimaan daerah yang didapatkan dari berbagai sumber-sumber pendapatan daerah yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan membangun daerah dan menjalankan roda pemerintahan.

## 2. Belanja Daerah

Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pembinaan masyarakat daerah. Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

## 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. (Mahmudi, 2016). Pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

## Rasio Keuangan Daerah

Rasio Keuangan merupakan suatu perhitungan rasio yang menggunakan laporan keuangan sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja dalam

sebuah perusahaan maupun instansi. Menurut Faud (2016:137), Rasio Keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, maksudnya yaitu penelitian yang melakukan perhitungan-perhitungan dan kajian-kajian terhadap data keuangan daerah yang diperoleh untuk memecahkan suatu masalah

yang ada yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari rasio keuangan yang terdiri dari beberapa indikator seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah berupa data kuantitatif, dimana data tersebut berupa data yang dihitung dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan dokumentasi mengambil dari website DJPK Kementerian Keuangan yaitu data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2014-2018.

### **Metode Analisa Data**

Metode penganalisa data dalam penelitian ini menggunakan 5 Rasio Keuangan yaitu Rasio Efektivitas

PAD, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian:

### Rasio Efektifitas PAD

Rasio yang menunjukkan tingkat efektifitas dari penerimaan PAD Daerah. Indikator dari rasio ini ada realisasi penerimaan PAD dan target penerimaan PAD. Rumus/perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian Pengukuran Efektifitas PAD

Presentase	Kriteria
(x>100%)	Efektif
(x=100%)	Efektif Berimbang
(x<100%)	Tidak Efektif

### Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi

pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Anggaran Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian Rasio Efisiensi

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah begitupun sebaliknya. . Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Dana Bantuan}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

### Rasio Pertumbuhan

Rasio dimana untuk mengetahui apakah daerah tersebut dalam anggaran periode tertentu kinerja keuangan mengalami pertumbuhan yang positif atau sebaliknya mengalami pertumbuhan yang negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P<sub>n</sub> = Total Pendapatan Daerah yang dihitung pada tahun ke-n

P<sub>0</sub> = Total Pendapatan Daerah yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

### Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

1. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio Belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja daerah}} \times 100\%$$

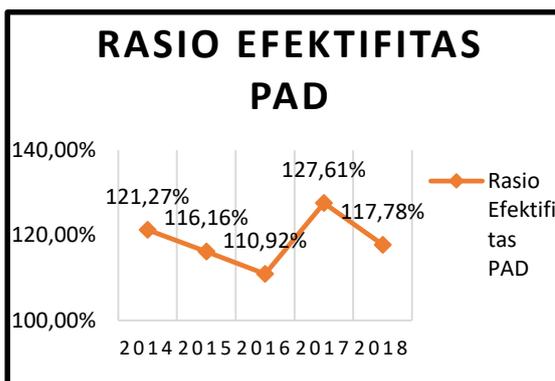
2. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio Belanja Modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

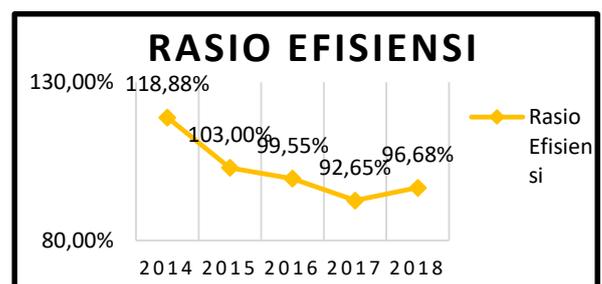
### Rasio Efektifitas PAD

Rasio Efektifitas PAD yaitu perhitungan untuk menilai target realisasi PAD yang didapat dengan target anggaran PAD yang sudah dirancang sebelumnya dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Realisasi PAD pada tahun 2014 sebesar Rp.1.115.332.938.501,00, tahun 2015 sebesar Rp.1.266.786.727.409,00, tahun 2016 sebesar Rp.1.335.284.797.901,00, tahun 2017 sebesar Rp.1.671.806.819.697,00, tahun 2018 sebesar Rp.1.685.558.666.147,01. Untuk Anggaran PAD tahun 2014 sebesar Rp.919.705.959.365,00, tahun 2015 sebesar Rp.1.090.575.879.460,00, tahun 2016 sebesar Rp.1.203.782.695.817,00, tahun 2017 sebesar Rp.1.310.069.237.292,00, tahun 2018 sebesar Rp.1.431.052.747.437,00. Hasil Perhitungan dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:



### Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

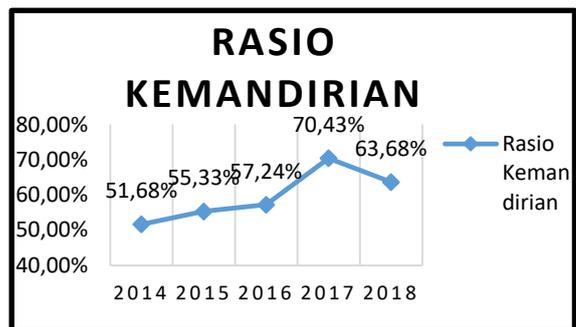
Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi bahwa realisasi belanja tiap tahun naik namun juga diimbangi dengan realisasi pendapatan yang juga mengalami kenaikan. Realisasi belanja pada tahun 2014 sebesar Rp.3.891.267.451.395,00, tahun 2015 sebesar Rp.3.662.799.265.943,00, tahun 2016 sebesar Rp.3.651.617.165.087,00, tahun 2017 sebesar Rp.3.748.313.122.059,00, tahun 2018 sebesar Rp.4.188.537.810.911,10. Untuk Realisasi Pendapatan tahun 2014 sebesar Rp.3.273.379.955.996,00, tahun 2015 sebesar Rp.3.556.219.138.762,00, tahun 2016 sebesar Rp.3.668.041.524.401,00, tahun 2017 sebesar Rp.4.045.685.362.113,00, dan tahun 2018 sebesar Rp.4.332.577.984.768,01. Hasil Presentase perhitungan Rasio Efisiensi pada tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:



## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pada perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sampai 2018 ada 3 point yang mempengaruhi perhitungan yaitu Realisasi PAD, Dana Transfer, dan Lain – lain Pendapatan Yang Sah, untuk Realisasi PAD tahun 2014 sebesar Rp.1.115.332.938.501,00, tahun 2015 sebesar Rp.1.266.786.727.409,00, tahun 2016 sebesar 1.335.284.797.901,00, tahun 2017 sebesar Rp.1.671.806.819.697,00, tahun 2018 sebesar Rp.1.685.558.666.147,00. Untuk Dana Transfer tahun 2014 sebesar Rp.1.402.935.437.170,00, tahun 2015 sebesar Rp.1.388.639.002.033,00, tahun 2016 sebesar Rp.1.690.087.000.000,00, tahun 2017 sebesar Rp.1.708.887.132.594,00, tahun 2018 sebesar Rp.1.793.474.341.790,00. Sementara untuk Lain – lain Pendapatan Yang Sah tahun 2014 sebesar Rp.755.111.580.325,00, tahun 2015 sebesar Rp.900.793.409.320,00, tahun 2016 sebesar Rp.642.669.726.500,00, tahun 2017

sebesar Rp.664.991.409.822,00, tahun 2018 sebesar Rp.853.544.976.831,00. Berikut dibawah ini hasil presentase perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dalam bentuk gambar grafik dibawah ini.



## Rasio Pertumbuhan

Berikut Grafik Pertumbuhan Pendapatan, PAD, Belanja Operasional dan Modal dibawah ini.



Berdasarkan perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan kenaikan

nya mengarah ke arah positif, tahun 2014 pendapatannya sebesar Rp.3.273.379.955.996,00 naik menjadi Rp.3.556.219.138.762,00 pada tahun 2015, di tahun 2016 naik menjadi Rp.3.668.041.524.401,00, tahun 2017 kembali naik menjadi Rp.4.045.685.362.113,00, tahun 2018 kembali naik menjadi Rp.4.332.577.984.768,01. Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Sidoarjo tiap tahun nya mengalami kenaikan, tahun 2014 sebesar Rp.1.115.332.938.501,00, tahun 2015 naik menjadi Rp.1.266.786.727.409,00, sementara tahun 2016 menjadi Rp.1.335.284.797.901,00, tahun 2017 naik menjadi Rp.1.671.806.819.697,00, sementara tahun 2018 naik menjadi Rp.1.685.558.666.147,01. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sempat turun dratis pada tahun 2015, tahun 2016,2017,2018 kembali naik, Belanja Operasional tahun 2014 sebesar Rp.2.509.235.777.530,00, tahun 2015 turun menjadi Rp.1.923.283.189.247,00, sementara

tahun 2016 naik kembali menjadi Rp.2.020.298.165.087,00, tahun 2017 kembali naik menjadi Rp.2.036.794.548.539,00, tahun 2018 sebesar Rp.2.177.927.459.154,16. Sementara Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 total Belanja Modal Rp.1.382.031.673.865,00, tahun 2015 sebesar Rp.1.739.516.076.696,00, tahun 2016 sebesar Rp.1.631.319.000.000,00, tahun 2017 sebesar Rp.1.711.518.573.520,00, tahun 2018 sebesar Rp.2.010.610.351.756,94.

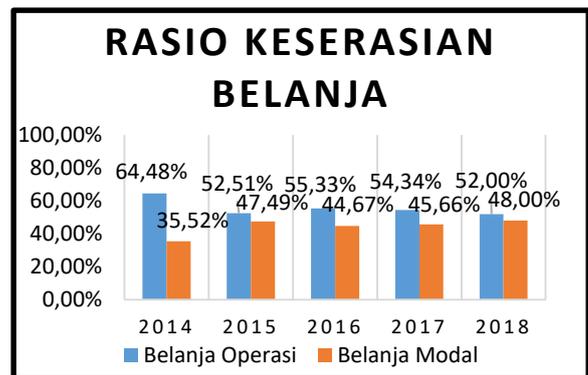
### **Rasio Keserasian**

Dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat bahwa realisasi total belanja operasional daerah Kabupaten Sidoarjo total tertinggi pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 turun dan 2016,2017,2018 angka nya naik namun tidak begitu tinggi, tahun 2014 totalnya sebesar Rp.2.509.235.777.530,00, tahun 2015 turun menjadi Rp.1.923.283.189.247,00, kemudian tahun 2016 naik menjadi Rp.2.020.298.165.087,00, tahun 2017 naik lagi menjadi

Rp.2.036.794.548.539,00, tahun 2018 naik menjadi Rp.2.177.927.459.154,16.

Untuk realisasi total belanja modal daerah Kabupaten Sidoarjo terus mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai 2018, tahun 2014 total sebesar Rp.1.382.031.673.865,00, tahun 2015 naik menjadi Rp.1.739.516.076.696,00, kemudian tahun 2016 naik lagi menjadi Rp.1.631.319.000.000,00, tahun 2017 naik menjadi Rp.1.711.518.573.520,00, Tahun 2018 naik menjadi Rp.2.010.610.351.756,94.

Sementara Total Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 sebesar Rp.3.891.267.451.395,00, tahun 2015 turun menjadi Rp.3.662.799.265.943,00, tahun 2016 kembali turun menjadi Rp.3.651.617.165.087,00, tahun 2017 naik menjadi Rp.3.748.313.122.059,00, tahun 2018 naik menjadi Rp.4.188.537.810.911,10. Hasil Perhitungan dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini.



### KESIMPULAN

Selama 5 tahun Rasio Efektifitas PAD tahun 2014: (121,27%), 2015: (116,16%), 2016: (110,92%), 2017: (127,61%), 2018: (117,78%), dan rata – rata Rasio nya sebesar 118,75% itu artinya kriteria yang didapat efektif karena diatas 100% namun begitu angka presentasinya cenderung fluktuatif, namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah baik kinerjanya dalam menyerap semua pendapatan asli daerah sehingga target anggaran selama 5 tahun tersebut dapat dilampaui.

Untuk Rasio Efisiensi pada tahun 2014 dan 2015 dikatak tidak efisien karena total belanja daerah lebih besar daripada pendapatan yang diterima, namun pada tahun 2016, 2017, 2018 sudah dikatakan efisien karena bisa

menekan belanja dan menyerap pendapatan lebih sehingga tidak terjadi defisit anggaran.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo rata – rata yang didapat nilainya sebesar 59,67% dan dari tahun 2014 sampai 2018 rasio yang didapat diatas 50% itu artinya kriteria yang di dapat yaitu partisipatif yang artinya bahwa bantuan dari Pemerintah Pusat sudah semakin berkurang, itu artinya juga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah mulai mampu untuk tergantung bergantung pada dana bantuan dan dapat memanfaatkan sumber – sumber pendapatan di daerah sendiri untuk dimanfaatkan dalam menjalankan roda pemerintahan dan juga membangun daerahnya.

Untuk Rasio Pertumbuhan keuangan Kabupaten Sidoarjo, untuk pendapatan total rata – rata pertumbuhan dari tahun 2014 sampai 2018 sebesar 11,25% untuk pertumbuhan PAD Kabupaten Sidoarjo sebesar 7,29%, Untuk Belanja Operasional rata – rata sebesar -2,64%, untuk Belanja Modal rata – rata sebesar 10,51%. Ini artinya

bahwa untuk Total Pendapatan Daerah dan PAD Kabupaten Sidoarjo pertumbuhannya kearah yang positif setiap tahunnya, dan untuk Belanja Operasional pertumbuhannya minus dikarenakan pengalokasian dana belanja lebih diarahkan ke Belanja Modal yang pertumbuhannya positif, itu artinya fokus Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sekarang adalah membangun Kabupaten Sidoarjo.

Rasio Keserasian keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dihitung dengan melihat Rasio Belanja Operasional dan Rasio Belanja Modal, jika dilihat pada tahun 2014 sampai 2018 pengalokasian Belanja Daerah lebih mengarah ke Belanja Modal karena setiap tahunnya Rasio Belanja Modal presentase naik sementara Rasio Belanja Operasional nya turun, ini berarti Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya menyasikan antara pengeluaran Operasional Daerah dengan pengeluaran guna membangun Kabupaten Sidoarjo dan hasil yang didapat presentasinya sudah bisa dikatakan Hampir serasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Akram Arif Nugroho. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 – 2012*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Cherrya Dhia Wenny. (2012). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ilmiah. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan STIE MDP Palembang.
- Dedi Nordiawan. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Jakarta. 2019. *Data Anggaran Dan Realisasi APBD Tahun 2014 Kabupaten Sidoarjo*. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada bulan Mei 2020)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Jakarta. 2019. *Data Anggaran Dan Realisasi APBD Tahun 2015 Kabupaten Sidoarjo*. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada bulan Mei 2020)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Jakarta. 2019. *Data Anggaran Dan Realisasi APBD Tahun 2016 Kabupaten Sidoarjo*. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada bulan Mei 2020)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Jakarta. 2019. *Data Anggaran Dan Realisasi APBD Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo*. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada bulan Mei 2020)

- Kabupaten Sidoarjo.  
(<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada bulan Mei 2020)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Jakarta. 2019. *Data Anggaran Dan Realisasi APBD Tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo*. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada bulan Mei 2020)
- Juddy Julian. (2012). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Juliani Dora. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2014*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Penerbit Andy.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Mohammad Mahsun. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:BPFE.
- Nurhidayat. (2005). *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004*. Bandung:Nuansa Aulia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung:Penerbit Alfabeta.